



Dilema Agama: Antara Pembebasan dan Konflik Telaah Sosiologis atas Konflik Islam-Kristen di Maluku Utara

Abdullah Ismail^{1✉}

¹Prodi Sosisologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univ. Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia, e-mail : abdullahismailx@gmail.com

Vol.	No.
1	1
Hal : 16 - 21	
Artikel Penelitian	

Info. Artikel:

Di terima :
Di revisi :
DI Publikasi :

✉ **Koresponden Author :**

Abdullah Ismail
e-mail :
abdullahismailx@gmail.com
Univ. Muhammadiyah
Maluku Utara
Ternate-Indonesia



Copyright©
J-SSH-Juni 2021

Abstrak.

Sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat adikodrati, agama telah hadir dan menjadi bagian terpenting dalam sejarah umat manusia. Agama tidak hanya terbatas memberikan pedoman bagi kehidupan dunia namun juga bagi kehidupan akhirat. Agama memberikan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan manusia, karena itu agama menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap individu maupun kelompok. Dalam realitasnya agama pada dimensi tertentu menjadi sumber konflik akibat internalisasi nilai – nilai agama yang sangat eksklusif mengakibatkan kecenderungan claim kebenaran terhadap agama yang dianut dan pada saat yang sama menganggap agama agama lain tersesat. Potret konflik antar agama di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia merefleksikan betapa pemahaman eksklusif masih menjadi pemicu yang dominan. tulisan ini mencoba melihat fenomena konflik keagamaan tersebut dengan disiplin sosiologi agama pada kasus konflik antara agama Islam dan Kristen di Provinsi Maluku Utara.

Keyword : Agama. Pembebasan, Konflik.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya agama membawa misi sebagai instrumen pembebasan, kedamaian dan keselarasan hidup. Agama yang sejatinya menempati posisi garda terdepan untuk perdamaian dunia, memanusikan manusia, membangun kesadaran, membebaskan, mencerahkan sekaligus mentransendensikan tindakan-tindakan manusia, justru dalam kenyataannya seringkali menjadi salah satu penyulut munculnya konflik sosial. Pada satu sisi agama mengajarkan kebaikan, perdamaian, tapi pada sisi yang lain agama juga merupakan sumber konflik sosial yang amat kejam dan berkepanjangan. Hal ini disebabkan dengan adanya klaim kebenaran, saling curiga pada tiap-tiap pemeluknya, dan ada juga faktor lain yang sesungguhnya bukan agamais, tetapi disebabkan oleh faktor sosiologis lainnya, entah kesenjangan ekonomi, politik, perbedaan ras, sentimen etnik, dan lain sebagainya, dengan alasan karena agama.

Dalam realitas sosial, konflik agama bisa terjadi manakalah doktrin agama semakin kuat, yakni terinternalisasinya perasaan dan sikap secara eksklusif pada diri para pemeluknya. Sikap ini bisa mengkondisikan para pemeluk agama mengklaim bahwa dirinya adalah paling benar. Apabila, sikap eksklusif ini terus-menerus terinternalisasi bahwa agamanya yang paling benar dan menganggap agama lain adalah “jalan yang salah yang membawa pengikutnya kepada kesesatan” – seperti sering dirumuskan oleh sejumlah teolog. Maka bukan tidak mungkin, sikap fanatik (eksklusif) yang seperti itu, akan mudah memicu konflik besar dan kekerasan massal antara pemeluk agama. Di satu sisi,

pengalaman juga menunjukkan bahwa percaturan isu agama, bahkan konflik agama-agama, sangat erat kaitannya dengan persoalan ekonomi dan politik.

Menurut A.N. Wilson dalam bukunya, *Against Religion: Why We Should Try to Live Without It* (Melawan Agama: Mengapa Kita Harus Mencoba Hidup Tanpa Agama), yang dikutip oleh Budhy Munawar Rachman (1999), “agama dapat dianggap menjadi penyebab terjadinya beberapa konflik sosial”. Selain itu, dalam kitab suci dikatakan, bahwa “cinta uang adalah akar segala kejahatan. Mungkin lebih benar lagi, kalau dikatakan bahwa cinta Tuhan dari pada yang lain adalah paling luhur, paling murni, paling tinggi dalam jiwa manusia. Namun, hampir tidak ada satu agama pun yang tidak ikut bertanggungjawab atas berbagai peperangan, tirani dan penindasan atas nama kebenaran. Selanjutnya Wilson juga sependapat dengan Marx yang menggambarkan, bahwa agama sebagai candu rakyat, tetapi agama jauh lebih berbahaya dari pada candu. Agama tidak membuat orang tertidur, tetapi agama mendorong orang untuk mengagungkan perasaan dan pendapat sendiri atas perasaan dan pendapat orang lain. Setiap pemeluk agama mengklaim bahwa dirinya sendiri sebagai pemilik kebenaran”.¹

Pandangan Wilson mengenai kecenderungan agama bisa membawa kepada berbagai macam konflik kebenaran memang terasa terlalu berlebihan dan sangat pesimistis. Namun, ia benar bahwa dalam suasana ekstrim dan fanatik, agama bisa membawahi manusia terjebak kepada situasi untuk saling “menganiyaya sesamanya”. Betapa banyak catatan sejarah yang bisa dikemukakan mengenai bermacam-macam konflik yang dapat diasalkan sebagai konflik antar agama atau dibenarkan dengan agama.²

Bila kita menengok perjalanan sejarah agama-agama tidak pernah luput dari masalah konflik hingga sekarang. Masih dalam ingatan kita, pada dekade akhir dari abad dua puluh masih menyisihkan sisa-sisa kejadian tragis berbau keagamaan: konflik berdarah di Ayodhya antara pemeluk Hindu dan pemeluk muslim pada tahun 1992, peperangan di Yugoslavia antara Bosnia Muslim dan Serbia Kristen ketika negara itu pecah pada tahun 1989, konflik-konflik berdarah bernuansa agama juga terjadi di Irlandia Utara, Srilangka, Israel, Sudan, dan Indonesia misalnya: pada tahun 1997 konflik di Poso antara Islam dan Kristen, tahun 1999 di Ambon Maluku dan Maluku Utara konflik ini juga bernuansa agama antara Islam dan Kristen.

Fakta-fakta konflik antar agama di atas, khususnya di Indonesia yang sebelumnya hubungan antar agama begitu akur penuh dengan toleransi, tetapi ketika terjadi perubahan politik di era reformasi ketegangan antara umat beragama mulai nampak di permukaan dan yang paling tragis adalah konflik Islam dan Kristen. Bila meminjam pendapat Samuel P. Huntington dalam idenya tentang *Clash of Civilization*, ia mengatakan bahwa, hubungan antara Islam dan Kristen, baik ortodoks maupun Barat, seringkali penuh ketegangan. Suatu ketika keduanya hidup berdampingan secara damai, akan tetapi di lain waktu lebih sering terlibat dalam hubungan yang penuh persaingan, dan dalam pelbagai tingkatan, terlibat dalam kecamuk perang. “Dinamika historikal” mereka, menurut John Esposito, “....seringkali sebagai dua komunitas yang saling bersaing, dan menatap pada pertempuran yang penuh kematian, demi kekuasaan, tanah, dan jiwa”. Selama berabad-abad, kedua agama tersebut – melalui sebuah momentum yang penuh gelombang, masa-masa jeda dan saling menyerang – mengalami jatuh bangun.³

Dari uraian di atas, maka tulisan ini mencoba melihat fenomena konflik keagamaan tersebut dengan disiplin sosiologi agama pada kasus konflik antara agama Islam dan Kristen di Provinsi Maluku Utara. Padahal, peristiwa kekerasan seperti ini sebelumnya tidak pernah terjadi dalam sejarah Maluku Utara. Masyarakat Maluku Utara selama ini interaksi antar agama baik-baik saja bahkan masyarakatnya dikenal sangat moderat. Pertanyaannya kenapa sekarang tiba-tiba berubah menjadi ekstrim? bagaimana para aktor dan institusi setempat dalam merespon peristiwa ini? Bagian akhir dari tulisan mencoba mengulas secara teoretik dengan perspektif konflik Karl Marx. Inilah beberapa tujuan kiranya akan menjadi pengarah pembahasan dalam tulisan ini.

¹ Lihat, Ma'arif Jamuin, *Manual Advokasi: Resolusi Konflik Antar Etnik dan Agama*, (Surakarta, Penerbit CISCORE, 2004), hal. 42 – 43.

² *Ibid*, hal. 43.

³ Lihat, Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, (Jakarta, Penerbit Qalam, 2009), hal. 378.

II. PEMBAHASAN

2.1. Kronologis Konflik, Keterlibatan Para Aktor dan Institusi di Maluku Utara

Maluku Utara merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia bagian timur yang ditetapkan 4 Oktober 1999, dengan Undang-undang No. 46/1999. Di awal kelahirannya disambut dengan petaka yang tragis, telah mengiris nilai-nilai kemanusiaan serta merusak tatanan sosial yang selama ini moderat dan toleran. Konflik di Maluku Utara 1999-2000 dapat dikatakan salah satu penyebabnya merupakan imbas dari konflik yang terjadi di Ambon. Kerusuhan di Ambon terjadi pada 19 Januari 1999 antara pihak Islam dan pihak Kristen. Konflik ini mengakibatkan banyaknya pengungsi baik Islam maupun Kristen berdatangan di Maluku Utara dengan membawa berbagai berita maupun isu yang telah memanaskan situasi di Maluku Utara hingga terinternalisasi menjadi dendam yang berdemensi agama.

Kondisi ini kemudian dipicu lagi dengan Kebijakan Pemerintah Pusat pada tanggal 24 Juni 1999 dikeluarkannya PP No. 42/99 tentang pembentukan kecamatan baru Makian-Malifut terpisah dari kecamatan induk Kao. Kebijakan ini menimbulkan ketidaksenangan dari masyarakat suku Kao yang mayoritas beragama Kristen yang merupakan penduduk asli terhadap suku Makian-Malifut yang beragama Islam, yang juga merupakan warga pendatang.

Dari sudut pandang masyarakat Kao, pembentukan kecamatan Makian-Malifut sebagai pencaplokan tanah adat mereka. Karena di dalam PP No. 42/99 juga memasukkan 6 desa dari kecamatan Jailolo dan 5 desa dari kecamatan Kao ke dalam kecamatan Makian-Malifut. Benih pertentangan ini juga ditambah dengan kecemburuan orang Kao (mayoritas beragama Kristen) yang melihat orang Makian lebih berhasil dalam penghidupan mereka baik sebagai wiraswasta, pegawai negeri dan pengisi jabatan birokrasi, hingga jadi pegawai perusahaan tambang emas "*Nusa Halmahera Minerals*" (NHM).⁴

Menurut Hulaleng (2000), beberapa tim pemerintah kabupaten dikirim untuk "memsosialisasikan" hal ini ke desa-desa Kao yang terkait. Orang-orang Kao, yang merasa dilangkahi, menerima dengan sikap bermusuhan. Masyarakat Mahasiswa etnik Makian-Kayoa (Makayoa) di Ternate pada gilirannya menanggapi tantangan tersebut. Mereka mengancam orang-orang Kao melalui sebuah stasion radio lokal: "Siapapun yang hendak coba-coba menghalangi pelaksanaan PP 42/99 harus berhadapan dengan para Mahasiswa Makayoa". Selanjutnya menurut Jusuf (1999), ketika Camat baru tiba di Malifut pada tanggal 18 Agustus 1999 untuk menduduki kursi jabatannya, sambil mengancam melalui pengeras suara untuk mengenyahkan siapapun yang menolaknya, dia harus menghadapi penolakan fisik orang-orang Kao. Beberapa hari kemudia terjadi pertempuran dan beberapa orang meninggal dunia.⁵ Pertentangan serta saling mengancam dengan kekerasan ini merupakan episode awal konflik horizontal di Maluku Utara.

Situasi tarik-menarik antara penduduk asli Kao dengan Makian-Malifut di atas, maka Bupati Maluku Utara kemudian meminta Sultan Ternate Mudaffar Syah untuk menyertainya berkunjung ke tempat ketegangan gelombang pertama pada tanggal 21 Agustus 1999 untuk berusaha menenagkan suasana. Meskipun demikian, Mudaffar memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan agenda pembentukan koalisinya sendiri. Menurut orang-orang Kristen Kao setempat, dia mengucapkan kata-kata yang menyulut kemarahan: "Saya punya anjing hitam, dan sekarang ada yang membangunkannya" (Gould, 1999). Sedangkan menurut Duncan (2005), Sultan berjanji membawa keperhatinan orang-orang Kao kepada pemerintah. Dengan demikian di mata orang-orang Makian, Sultan telah menempatkan diri sebagai pendukung orang-orang Kao. Kelompok elit Kao sementara itu memutuskan untuk mengenyahkan orang-orang makian di wilayah itu, baik dengan diplomasi maupun lewat pengadilan, atau jika perlu dengan cara kekerasan.⁶

Kehadiran Bupati Maluku Utara dan Sultan Mudaffar Syah ternyata tidak bisa menyelesaikan pertentangan yang terjadi, hingga dua bulan kemudian Provinsi Maluku Utara pada tanggal 4 Oktober 1999 benar-benar resmi menjadi provinsi defenitif. Malifut merupakan bagian dari rangkaian implementasi tersebut. Menurut Gerry Van Klinken, itulah saat untuk yang paling menentukan, siapa yang akan menjadi Gubernurnya? Pada tahap itulah si anjing hitam kembali menyerang. Pada Minggu sore

⁴ Lihat, Syafuan Rozi, dkk, *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Yogyakarta, kerjasama Pustaka Pelajar dengan LIPI, 2006), hal.204-205.

⁵ Lihat, Gerry Van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 198.

⁶ *Ibid*, hal. 198-199.

tanggal 24 Oktober 1999, terjadi lagi serangan besar-besaran warga Kao terhadap Makian-Malifut (yang beragama Islam) yang dipimpin oleh seorang pria bernama Benny Bitjara (Benny Doro) menyerang balik setelah pada pagi harinya diancam oleh orang Makian-Malifut karena melanggar batas wilayah. Tiap rumah Makian-Malifut di wilayah itu dibakar habis. Akibatnya penduduk Makian-Malifut berjumlah 17.000 orang mengungsi ke barat menyebrang selat menuju Ternate dan Tidore. Ini merupakan kemenangan putaran pertama bagi Sultan Mudaffar Syah.⁷ Kehadiran pengungsi Makian-Malifut yang turun dari perahu meletupkan kemarahan di hati orang-orang Ternate dan Tidore. Para aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) anti-Mudaffar, Makian menggunakan momentum ini untuk memperluas jangkauan mereka. Mereka membangun aliansi dengan para aktivis Muslim setempat, dan, secara kursial mereka mengubah pesan mereka dari etnik Makian menjadi antara agama Islam dan Kristen.⁸ Dari perubahan pesan konflik etnik ke isu agama inilah peta konflik mulai menyebar di wilayah Maluku Utara. Pada tanggal 3 Nopember 1999 medan pertempuran bergeser ke Tidore dan kemudian pada tanggal 6 Nopember 1999 terjadi di Kota Ternate bagian Selatan, penyerangan diorganisir melalui masjid-masjid dan dibantu oleh pasakukan dari Makian, Kayoa dan Tidore, di mana yang banyak menjadi korban ialah komunitas Kristen.

Kerusuhan kemudian menjalar ke daerah-daerah Halmahera Utara. Masyarakat Halmahera Utara terbelah antara kelompok Islam dan kelompok Kristen. Hal ini dipicu dengan kehadiran sebagian pengungsi Kristen dari Tidore dan Ternate ke Tobelo sebagai salah satu kota yang penduduknya mayoritas Kristen, sekaligus merupakan pusat Gereja Masehi Injil Halmahera (GEMIH) yang umatnya cukup banyak. Menurut Duncan (2005), pada saat yang sama, kaum elit Kristen di Tobelo mulai menuntut bahwa semua orang keturunan Tidore, Makian dan Kayoa meninggalkan kecamatan Tobelo. Beberapa orang Muslim melawan secara lemah dengan cara menuntut pengusiran orang-orang Kristen Ambon agar segera meninggalkan kota, tentu saja tidak terjadi. Baik pihak Kristen maupun Muslim mulai mempersenjatai diri.⁹

Pada tanggal 26 Desember 1999, sehari setelah Natal, pecah lagi di Tobelo. Menurut Ahmad dan Oesman (2000), pertempuran awalnya dimenangkan oleh pihak Muslim. Tetapi, armada Kristen, yang dibantu oleh berbagai aliansi dari Kao dan kembali di pimpin Benny Doro berhasil menyerang balik keesokan harinya dan kembali menguasai kota. Dari seluruh konflik yang terjadi di Maluku Utara, kejadian di wilayah ini menelan korban meninggal paling banyak.¹⁰ Lagi-lagi setiap pengerahan pasukan selalu terorganisir melalui tempat-tempat ibadah, bahkan pembantaian juga terjadi di dalam tempat ibadah baik di pihak Islam maupun Kristen.

Dari tahapan-tahapan konflik di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa konflik agama di Maluku Utara semakin di isi kental dengan dimensi politis, etnik dan perebutan sumber-sumber ekonomi. Kondisi seperti inilah, posisi elite-elite agama dan institusi agama kemudian terkooptasi ke dalam suasana konflik, yang sering kali ikut menyediakan sarana dan prasarana bagi terjadinya konflik. Elit-elite dan institusi agama ini juga cenderung berperan ganda, pada satu sisi sebagai instrumen pembebasan (pengawal moral), namun pada saat yang sama, bisa juga menjadi alat legitimasi kekuasaan dalam melakukan tindak kekerasan.

Menurut Komaruddin Hidayat (2006), dampak dari kezaliman yang dilakukan sekelompok orang di lingkaran pusat kekuasaan maka seluruh rakyat harus ikut menanggung derita. Adanya simbol-simbol keagamaan yang mencuat selama kerusuhan itu, sesungguhnya motif yang paling mendasar adalah tuntutan terhadap keadilan politik dan ekonomi. Selama ini rakyat merasa teralienasikan dari proses politik dan bahkan mereka menjadi korban pembangunan yang lebih memihak pada lapisan elite dan kelompok etnis tertentu.¹¹ Maluku Utara merupakan salah satu bukti dari stemen di atas, sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan yang memakan korban jiwa, kerugian harta benda, terutama bagi rakyat kecil yang tidak tahu menau tergiring masuk dalam kepentingan para elite di balik konflik dan merekalah korban terbesar dari setiap konflik yang terjadi.

⁷ *Ibid*, hal. 199.

⁸ *Ibid*, hal. 199.

⁹ *Ibid*, hal 200-201

¹⁰ *Ibid*, hal. 201.

¹¹ *Lihat, Komaruddin Hidayat, Politik Panjat Pinang: Di mana Peran Agama?, (Jakarta, Kompas, 2006), hal. 145-146.*

2.2. Analisis Teoretik

Konflik Maluku Utara, berdasarkan kronologis, kerlibatan aktor dan institusi yang ada ternyata faktor ekonomi, sosial dan politik terkesan lebih kental dari pada faktor agama itu sendiri. Sentimen agama berfungsi dan digerakkan setelah kekerasan itu terjadi. Ini akibat dari simbol-simbol agama berhasil dimainkan oleh para elite melalui institusi, maka secara meyakinkan dapat merepresentasi kelompok-kelompok yang bertikai dan membentuk jaringan afiliasi berdasarkan identitas agama, sehingga kesan bahwa konflik terjadi karena faktor agama, menjadi tak terhindarkan. Fakta yang bisa dilihat misalnya, kedua kelompok yang bertikai beragama Islam dan Kristen, berbasis di Masjid dan Gereja, kemudian melegitimasi hal-hal yang bersifat teologis untuk membenarkan setiap kekerasan sebagai perang suci atas nama agama dan Tuhan.

Dari fakta-fakta konflik agama di atas, maka penulis mencoba menganalisis dengan perspektik konflik Karl Marx. Perspektif konflik berpandangan bahwa masyarakat berada dalam konflik yang terus-menerus di antara kelompok dan kelas, atau dengan kata lain konflik dan pertentangan dipandang sebagai determinan utama dalam upaya-upaya yang dilakukan berbagai individu dan kelompok untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas yang akan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.

Pandangan Marx, bahwa inti drama sejarah adalah pertentangan/perjuangan kelas, suatu konflik yang dikontrol dari bawah oleh realitas kehidupan ekonomi yang sangat sulit.¹² Basis ekonomilah yang menentukan dimensi struktur sosial mana (agama, politik, ideologi atau yang lain) yang akan dominan. Mengingat agama sebagai bangunan atas yang harus mengabdikan kepada ekonomi sebagai basis, maka agama - paling tidak ketika ia hidup saat penguasa gereja tengah berkolusi dengan kalangan politisi dan pengusaha - ikut membantu terpeliharanya situasi eksploitatif tersebut. Agama bukan hanya sebagai ekspresi ekonomi, tetapi juga secara khas memberi dukungan moral atas kepincangan sosial.¹³ Bila hal ini dikaitkan dengan konflik di Maluku Utara, maka nampak bahwa keterlibatan para elite agama sangat kuat dalam perebutan sumber-sumber ekonomi dan kekuasaan (politik) di Maluku Utara. Pada akhirnya, yang menjadi korban adalah umatnya atau rakyat kecil; yang berjuang habis-habisan dengan satu keyakinan untuk memperoleh kehidupan bahagia di akhirat (surga). Agama yang mestinya menjadi instrumen pembebasan/pembelaan terhadap yang tertindas, malah direduksi oleh para elite agama itu sendiri untuk kepentingan ekonomi, sosial dan kekuasaan (politik). Dalam bahasa Marx, disebut alienasi. Alienasi yang dilihat dalam agama hanya merupakan ekspresi dari ketidakbahagiaan yang lebih dasar, yang selalu bersifat ekonomi. Oleh karena itu, alienasi yang tampak dalam agama harus dilihat sebagai suatu ekspresi, bayangan balik dari alienasi manusia yang riil dan mendasar, yang lebih bersifat ekonomi dan material dari pada spiritual.¹⁴

Dalam kaitannya dengan kekuasaan, agama juga dipandang sebagai alat bagi kaum elite politik untuk mempertahankan kekuasaannya (agama, kekuasaan, dan politik memiliki hubungan yang erat). Karena perebutan kekuasaan dalam suatu negara atau daerah akan terus berlangsung, agama-agama berlomba untuk semakin mendekatkan diri dengan sumber-sumber kekuasaan dari masa ke masa. Oleh karena itu, dalam perspektif konflik agama dilihat sebagai "kesadaran yang palsu", karena hanya berkenaan dengan hal-hal yang sepele dan semu atau hal-hal yang tidak ada seperti sungguh-sungguh mencerminkan kepentingan ekonomi kelas sosial yang berkuasa. Dalam pandangan Marx, agama tidak hanya membenarkan ketidakadilan tetapi juga mengilustrasikan kenyataan bahwa manusia dapat menciptakan institusi-institusi sosial, dapat didominasi oleh ciptaan mereka dan pada akhirnya percaya bahwa dominasi adalah sesuatu yang sah.

Kondisi seperti inilah yang terjadi dalam konflik agama di Maluku Utara, dan para elit agama pun terbawa dalam suasana selama konflik berlangsung.

III. PENUTUP

Konflik yang terjadi di Maluku Utara lebih kental dengan faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik, ketimbang faktor agama itu sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Marx, bahwa mengingat ekonomi merupakan pondasi atau faktor penentu segala hal, termasuk di dalamnya agama, maka agama

¹² Lihat, Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*, (Yogyakarta, Penerbit Qalam, 2001), hal. 228.

¹³ Lihat, Bryan S. Turner, *Agama dan Teori Sosial*, (Yogyakarta, Penerbit IRCiSoD, 1991) hal. 127.

¹⁴ Lihat, Daniel L. Pals, *op.cit*, hal. 236.

dengan demikian berada di atas pondasi ekonomi kapitalistik yang eksploitatif yang melahirkan kepincangan sosial dan keterasingan tersebut. Agama telah mengabdikan pada kepentingan ekonomi itu dengan cara dua hal;¹⁵ *pertama* sebagai alat justifikasi teologis bagi berlangsungnya kondisi yang menghisap; dan *kedua* penekanannya pada dunia transendental dan kebahagiaan hidup setelah mati telah mengalihkan perhatian masyarakat dari penderitaan dan kesulitan hidupnya. Agama dalam hal ini hanya merupakan ekspresi keterasingan manusia industri belaka.

Para elit agama yang mestinya memberikan pemahaman tentang fungsi agama sebagai instrumen pembebasan, perdamaian, kebaikan, memanusiasikan manusia, membangun kesadaran, membebaskan, mencerahkan sekaligus mentransendensikan tindakan-tindakan manusia, justru dalam kenyataannya juga ikut menyulut terjadinya konflik yang mengorbankan umatnya atau rakyat kecil. Di sinilah kritik Marx, bahwa agama adalah “candu masyarakat” yang mengelabui kesadaran manusia. Manusia seharusnya bekerja untuk kesejahteraan hidupnya, tetapi agama telah mengalihkan perhatian ini ke tempat lain, sehingga terasing dari kenyataan yang sesungguhnya, yakni untuk kebahagiaannya. Namun, para pemuka agama telah salah menanamkan kesadaran *ideologi* (struktur borjuis/kelas yang menikmati keuntungan ekonomis) yang keliru sehingga tidak melahirkan pikiran kritis dari umatnya. Jadi mereka tidak bisa melihat apa yang sesungguhnya terjadi di balik konflik agama tersebut. Pada hal, yang terjadi sesungguhnya adalah lebih banyak merupakan konflik di bidang ekonomi dan politik yang kemudian dibalut dengan atas nama agama dan Tuhan.

Daftar Pustaka

- Huntington, Samuel, P, 2009, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Jakarta, Penerbit Qalam.
- Hidayat, Komaruddin, 2006, *Politik Panjat Pinang: Dimana Peran Agama?*, Jakarta, Penerbit Kompas.
- Jamuin, Ma’arif, 2004, *Manual Advokasi, Resolusi Konflik Antar Etnik dan Agama*, Solo, Penerbit CISCORE.
- Klinken, Gerry, Van, 2007, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, Jakarta, Penerbit KITLV Kerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia.
- Kamil, Sukron, 2002, *Pemikiran Karl Marx “Agama sebagai Alienasi Masyarakat Industri”*, Jakarta, Univ. Paramadina, Jurnal Vol. 1 No. 2.
- Pals, Daniel, L, 2001, *Seven Theories of Religion*, Jakarta, Penerbit Qalam.
- Rozi, Syafuan, dkk, 2006, *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Kerjasama dengan LIPI.
- Turner, Bryan, S, 2003, *Agama dan Teori Sosial*, Yogyakarta, Penerbit IRCiSoD.

¹⁵ Lihat, Sukron Kamil, *Pemikiran Karl Marx “Agama sebagai Alienasi Masyarakat Industri”*, (Universitas Paramadina, Jurnal Vol. 1 No. 2, 2002).